



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Iman Bonjol No. 5 Medan - Sumatera Utara

[HOME](#)[SEJARAH](#)[PIMPINAN DEWAN](#)[FRAKSI](#)[KOMISI](#)[ALAT KELENGKAPAN DEWAN](#)[TENTANG DEWAN](#)[SEKRETARIAT DEWAN](#)

## RAPAT KERJA GABUNGAN KOMISI D DAN B DPRD PROVSU DENGAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVSU,

Posted January 29, 2019

Written by [user](#)

Category [Umum](#)

**RAPAT KERJA GABUNGAN KOMISI D DAN B DPRD PROVSU DENGAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVSU, DINAS PERHUBUNGAN PROVSU, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS KEHUTANAN PROVSU, BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I MEDAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**



Selasa, 29 Januari 2019, Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja gabungan dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provsu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provsu., Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Medan, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan agenda pembahasan terkait longsor di jembatan Sidua-dua Kabupaten Simalungun serta dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara.





Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara (H. Burhanuddin Siregar, SE) yang bertindak sebagai pimpinan rapat dan menyampaikan bahwasanya Dinas Jalan dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II perlu diundang dalam rapat ini. Dalam rapat tersebut diungkapkan untuk penanganan yang menyeluruh, diperlukan kajian secara menyeluruh, yaitu membangun jembatan baru ke arah Danau Toba dengan posisi lebih tinggi dari bangunan sebelumnya.



Ka. UPT PKA Danau, Toba Fauzi Ilsa (perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provsu) menyampaikan penanganan harus diselesaikan dari hulu, di mana kondisi tanah yang tidak mampu menahan debit air dari tiga titik mata air yang mengalir ke bawah dikarenakan pohon-pohon di sekitar sudah menua dan rapuh. Terkait kerusakan di bagian hulu jembatan Sidua-dua, Dinas Kehutanan Provsu (Effendi Pane) bukan merupakan kawasan hutan lindung, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk perbaikan. Terkait hal ini, Anggota Komisi D DPRD Sumut Aripay Tambunan mengusulkan untuk mengembalikan fungsi kawasan ini menjadi hutan (lindung) dan jangan lagi jadi tempat untuk mata pencaharian.



Sebagai rencana tindak lanjut, Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan berencana akan melihat kondisi secara langsung ke lapangan